

OVERVIEW PSAK KONVERGENSI IFRS TERBARU

Oleh : Ersa Tri Wahyuni, PhD, CA, Ak, CPMA, CPSAK
(Universitas Padjadjaran, Anggota DSAK-IAI)

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Agenda



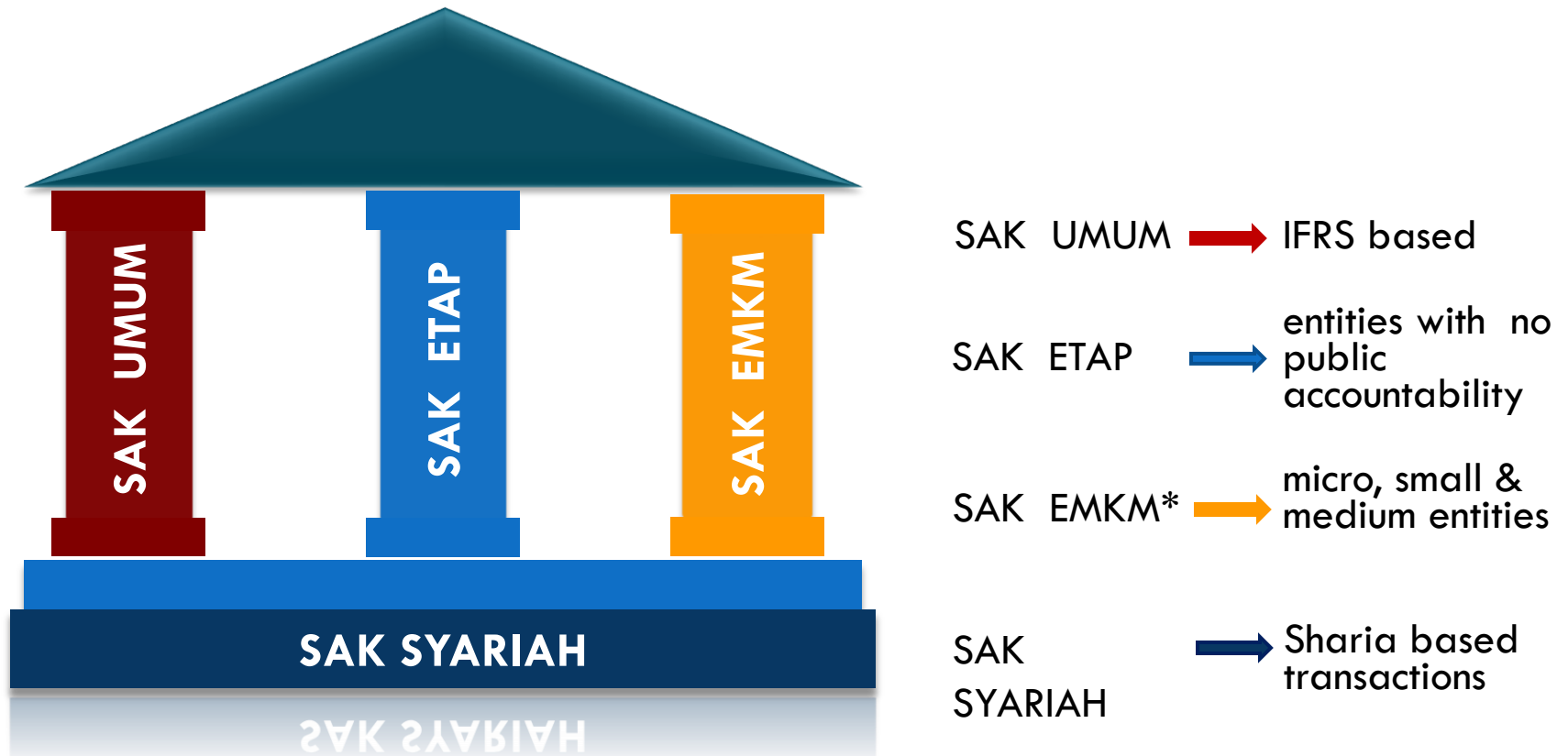
2

- Pillar SAK di Indonesia dan perkembangannya
- Overview Konvergensi IFRS
- Overview Standar dan Interpretasi terbaru tahun 2015-2017

3

PILAR Sak di indonesia

PILLARS SAK di INDONESIA



* New pillar introduced by DSAK IAI on 24 October 2016, effective 1 January 2018.

SAK ETAP



5

- SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik **signifikan**
- ETAP adalah entitas yang:
 - ▣ Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
 - ▣ Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
- Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.
- Lebih sederhana antara lain:
 - ▣ Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan
 - ▣ Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
 - ▣ Pajak menggunakan konsep pajak terutang bukan pajak tangguhan
 - ▣ Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.
- Tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK-IFRS atau PSAK-ETAP

- Basis transaksi
- Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah
- Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI
- PSAK 100 – PSAK 110

- PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 102 Akuntansi Murabahah) Revisi 2013
- PSAK 103 Akuntansi Salam
- PSAK 104 Akuntansi Istishna
- PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

- PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
- PSAK 107 Akuntansi Ijarah
- PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh
- PSAK 110 Akuntansi Sukuk

PSAK – IFRS BASED



7

- Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.
- Dapat diterapkan oleh entitas lainnya.
- Basis transaksi, bukan basis industri.
- Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan
- Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012 – tahap 1
- Proses adopsi tahap kedua efektif 1 Januari 2015

SAK EMKM



Memenuhi definisi ETAP

Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan

Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal

Memenuhi kriteria ini selama 2 tahun berturut turut maka bisa menggunakan SAK EMKM

Memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM

Bukan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian, secara langsung atau tidak langsung (Pasal 1)

Rentang kuantitatif tertentu: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan (Pasal 6)

Tidak memiliki/menguasai UMKM mitra usahanya (Pasal 35)

Struktur Isi SAK ETAP VS SAK EMKM



9

Struktur SAK ETAP	Padanan dalam SAK EMKM
Bab 1. Ruang Lingkup	Bab 1. Ruang Lingkup
Bab 2. Konsep dan Prinsip Pervasif	Bab 2. Konsep dan Prinsip Pervasif
Bab 3. Penyajian Laporan Keuangan	Bab 3. Penyajian Laporan Keuangan
Bab 4. Neraca	Bab 4. Laporan Posisi Keuangan
Bab 5. Laporan Laba Rugi	Bab 5. Laporan Laba Rugi
Bab 6. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	-
Bab 7. Laporan Arus Kas	-
Bab 8. Catatan atas Laporan Keuangan	Bab 6. Catatan atas Laporan Keuangan
Bab 9. Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan	Bab 7. Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan
Bab 10. Investasi pada Efek Tertentu	Bab 8. Aset dan Liabilitas Keuangan
Bab 11. Persediaan	Bab 9. Persediaan
Bab 12. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak	-
Bab 13. Investasi pada Joint Venture	Bab 10. Investasi pada Ventura Bersama
Bab 14. Properti Investasi	-
Bab 15. Aset Tetap	Bab 11. Aset Tetap
Bab 16. Aset Tidak Berwujud	Bab 12. Aset Tidak Berwujud
Bab 17. Sewa	Bab 14. Pendapatan dan Beban
Bab 18. Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi	Bab 13. Liabilitas dan Ekuitas
Bab 19. Ekuitas	
Bab 20. Pendapatan	
Bab 21. Biaya Pinjaman	Bab 14. Pendapatan dan Beban
Bab 22. Penurunan Nilai Aset	
Bab 23. Imbalan Kerja	
Bab 24. Pajak Penghasilan	Bab 15. Pajak Penghasilan
Bab 25. Mata Uang Pelaporan	Bab 3. Penyajian Laporan Keuangan
Bab 26. Transaksi dalam Mata Uang Asing	Bab 16. Transaksi dalam Mata Uang Asing
Bab 27. Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan	-
Bab 29. Ketentuan Transisi	Bab 17. Ketentuan Transisi
Bab 30. Tanggal Efektif	Bab 18. Tanggal Efektif
Daftar Istilah	-
-	Contoh Ilustratif Laporan Keuangan Entitas
-	Dasar Kesimpulan

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)



10

- Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 → PP 71 tahun 2010
- Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP
- Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD:
 - ▣ instansi pemerintah pusat
 - ▣ Instansi pemerintah daerah
 - ▣ BLU dikonsolidasikan dengan LKP – menggunakan PSAP dan PSAK,
 - ▣ BUMN (sbg investasi pemerintah) → menggunakan PSAK
- Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 untuk pelaporan dan yang lain mengikuti PSAK / SAK ETAP.

Perubahan Pilar/Standar Akuntansi di Masa Depan



11

- DSAK sedang mengkaji untuk melakukan revisi atas SAK ETAP karena sudah terlalu lama tidak direvisi, juga melihat hadirnya SAK EMKM
- DSAK sedang mengkaji untuk merevisi PSAK 45 untuk entitas nir laba
- Belum diputuskan apakah IFRS for SME akan diadopsi
- Belum diputuskan apakah PSAK 45 akan dikembangkan menjadi beberapa standar
- DSAK sedang mengkaji keberadaan ISAK 25 Hak atas Tanah terkait dengan akan diadopsinya IFRS 16 Leases

Konvergensi IFRS di Indonesia dan Update PSAK 2015-2017

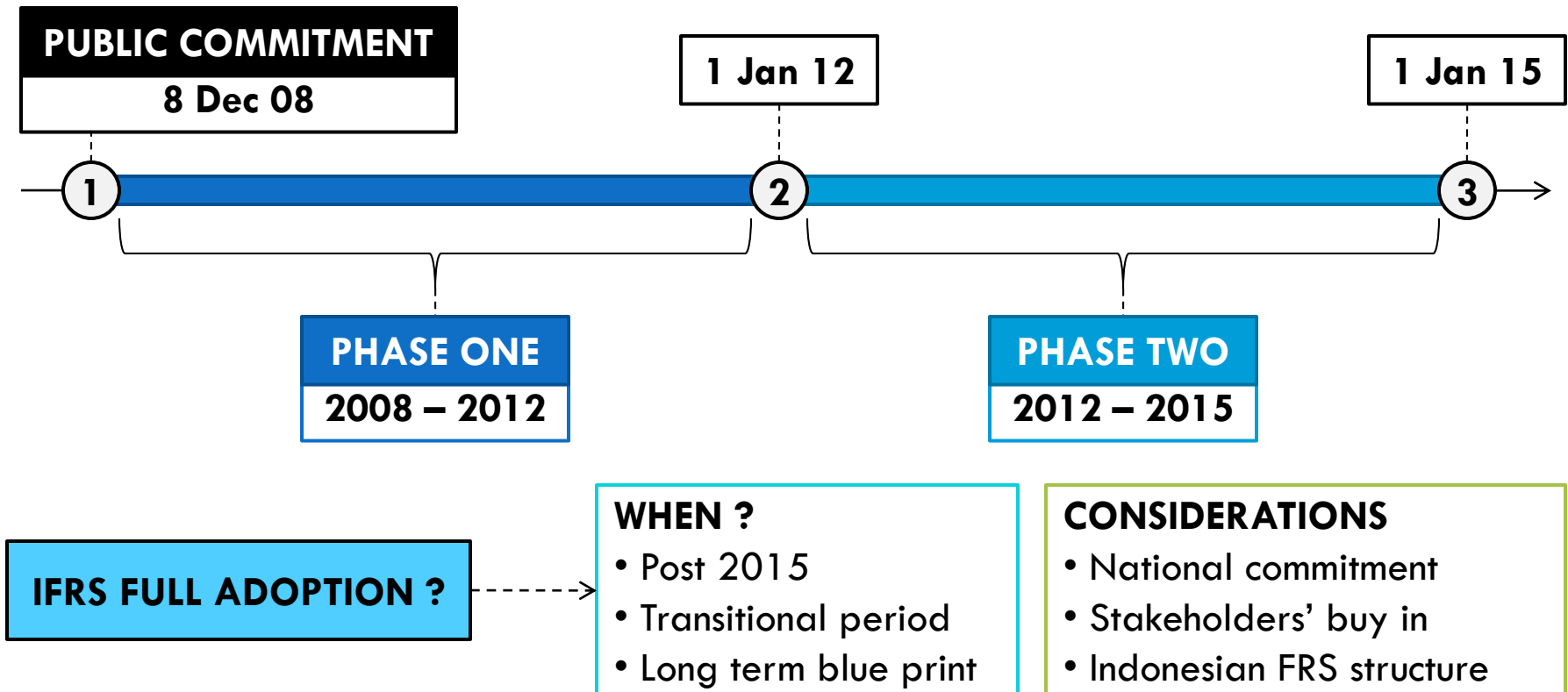
Memahami IFRS

13

- IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dibuat oleh IASB (International Accounting Standard Board) yang berkedudukan di London
- Saat ini telah diadopsi oleh sekitar 142 negara di dunia
- Level adopsi berbeda beda, untuk Indonesia IFRS menjadi referensi utama dalam penyusunan PSAK
- IFRS dibuat dengan tujuan untuk memudahkan transaksi modal lintas negara

Konvergensi IFRS DI INDONESIA

14



Konvergensi IFRS Di Indonesia



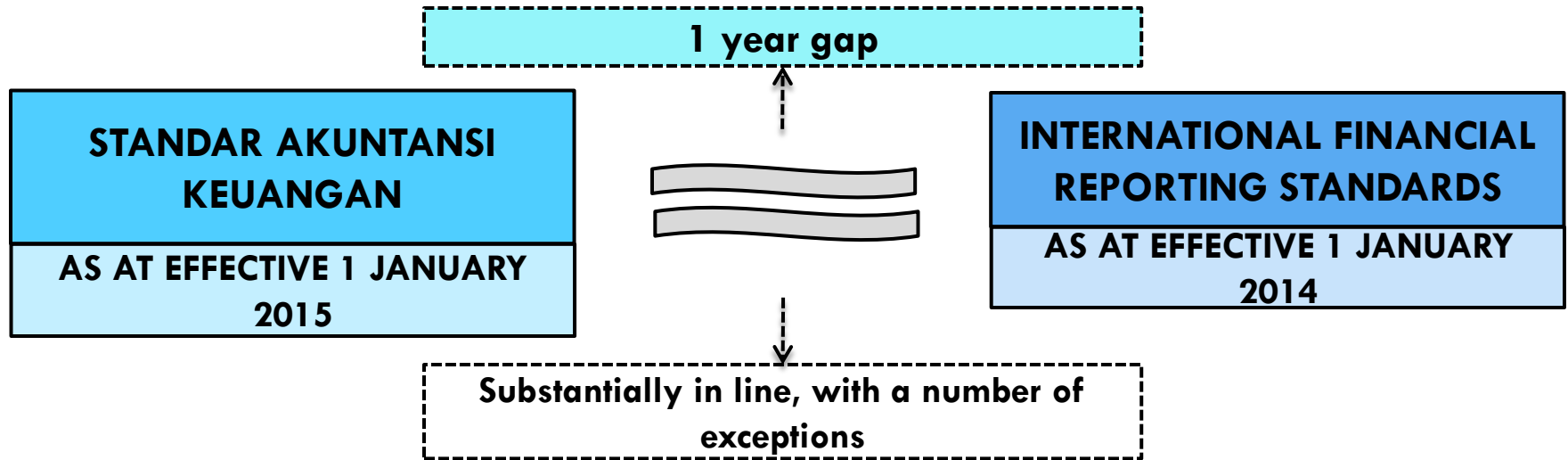
15

- Komitment dicanangkan oleh IAI pada tanggal 8 Desember 2008 untuk mendukung IFRS sebagai standar global.
- Konvergensi secara bertahap menuju adopsi full IFRS
- Tujuan konvergensi adalah mengurangi perbedaan signidikan antara SAK dan IFRS
- Indonesia belum memberikan target kapan mengadopsi penuh IFRS.
- Definisi full adopsi IFRS adalah mengadopsi tanpa mengubah kata dan dengan tanggal efektif sama dengan IFRS.

CONVERGENCE STATUS AS AT 1 JANUARY 2015



16



- During 2013-2014 DSAK IAI has issued (including new and revision): 13 PSAK and 4 ISAK along with annual improvements of SAK.
- During 2015 DSAK IAI has issued (including new and revision): 11 PSAK and 2 ISAK along with annual improvements of SAK.

Mengapa IFRS

17

- Indonesia bagian dari IFAC, yang harus tunduk pada SMO (*Statement Membership Obligation*), salah satunya menggunakan IFRS sebagai *accounting standard*.
- Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum.
- Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 :
 - “Strengthening Transparency and Accountability”
- Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk *Strengthening Financial Supervision and Regulation* → “to call on the *accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and **achieve a single set of high-quality global accounting standards.***”

Manfaat IFRS



18

- Meningkatkan daya banding laporan keuangan.
- Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
- Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
- Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.
- Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “*best practise*”.

Karakteristik Standar ??

Dinamis

**Principle Based :
Judgment**

**Lebih banyak
Pengungkapan**

Fair Value



20

PSAK dan ISAK BARU tahun 2015-2016

PSAK non IFRS di dalam SAK

21

1. PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian;*
2. PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa;*
3. PSAK 38: *Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;*
4. PSAK 44: *Pendapatan Real Estate*
5. PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;*
6. PSAK 70 : *Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak*
7. ISAK 25: *Hak atas Tanah*
8. ISAK 31: *Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti Investasi*
9. ISAK 32 : *Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan*
10. *Plus PSAK-PSAK Syariah*

Perkembangan IFRS dan PSAK Tahun 2015 dan 2016



22

IFRS terbaru:

- IFRS 9 Financial Instruments (efektif 1 Januari 2018) – Sudah diadopsi menjadi ED PSAK 71
- IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (efektif 1 Januari 2016) – belum diadopsi karena dirasa tidak relevan untuk Indonesia
- IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (efektif 1 Januari 2017) – telah diadopsi menjadi ED PSAK 72
- Amandemen IAS 41 Agriculture (efektif 1 Januari 2016) – Sudah Diadopsi menjadi amandemen PSAK 16
- IFRS 16 Leases – Akan diadopsi dan masuk agenda DSAK tahun 2017

Pembahasan IASB:

- IFRS 4 Insurance Contracts
- Amandemen dan penyesuaian IFRS lain

PSAK Berlaku 2015 dan 2016



23

- PSAK 68 Nilai Wajar (berlaku 1 Jan 2015)
- PSAK 69 Agrikultur (berlaku 1 Jan 2016)
- PSAK 70 Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Berlaku Juni 2016, sesuai tgl efektif UU Pengampunan pajak)

PSAK dalam bentuk ED dan belum disahkan (per 4 Maret 2017)



24

- ED PSAK 71 : Instrumen Keuangan → dalam ED nya akan berlaku 1 januari 2019, namun DSAK belum mengambil keputusan
- ED PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, masa efektif seharusnya sama dengan ED PSAK 71
- ED ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan, tanggal efektif dalam ED nya 1 Januari 2017.

Daftar PSAK Berbasis IFRS sampai 1 Desember 2016



No	IFRS		PSAK	
1	IFRS 1	First-time Adoption of International Financial Reporting Standards		
2	IFRS 2	Share-Based Payment	PSAK 53	Pembayaran Berbasis Saham (R2011)
3	IFRS 3	Business Combinations	PSAK 22	Kombinasi Bisnis (revisi 2010)
4	IFRS 4	Insurance Contracts	PSAK 62	Kontrak Asuransi (revisi 2011)
5	IFRS 5	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations	PSAK 58	Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (revisi 2009)
6	IFRS 6	Exploration for and Evaluation of Mineral Resources	PSAK 64	Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral (R2011)
7	IFRS 7	Financial Instruments : Disclosure	PSAK 60	Instrumen Keuangan Pengungkapan (R2013)
8	IFRS 8	Operating Segments	PSAK 5	Segmen Operasi (revisi 2009)
9	IFRS 9	Financial Instrument – Juli 2014	ED PSAK 71	Instrumen Keuangan
10	IFRS 10	Consolidated Financial Statement	PSAK 65	Laporan Keuangan Konsolidasian
11	IFRS 11	Joint Arrangement	PSAK 66	Pengaturan Bersama
12	IFRS 12	Disclosure of Interest Entity	PSAK 67	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
13	IFRS 13	Fair Value	PSAK 68	Pengukuran Nilai Wajar
14	IFRS 14	Regulatory Deferral Accounts	NA	NA
15	IFRS 15	Revenue from Contracts with Customers	ED PSAK 72	Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
16	IFRS 16	Leases		Belum diadopsi

PSAK & ISAK



No	IFRS		PSAK	
1	IFRIC 1	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and similar liabilities	ISAK 9	Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi & Liabilitas Serupa
2	IFRIC 2	Members' Share in Co-operative Entities and Similar Instruments		Tidak diadopsi
3	IFRIC 4	Determining whether an arrangement contains a Lease	ISAK 24	Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang mengandung Bentuk Legal Sewa
4	IFRIC 5	Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental rehabilitation Funds		Tidak diadopsi
5	IFRIC 6	Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Water electrical and Electronic Equipment		Tidak diadopsi
6	IFRIC 7	Applying the Restatement Approach under IAS 29	ISAK 19	Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
7	IFRIC 10	Interim Financial Reporting and Impairment	ISAK 17	Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
	IFRIC 19	Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments	ISAK 28	Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
	IFRIC 20	Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining	ISAK 29	Biaya Pengupasan Lapisan Tanah tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka,
8	IFRIC 12	Service Concession Arrangements	ISAK 16	Perjanjian Konsesi Jasa
9	IFRIC 13	Consumer Loyalty Programmes	PSAK 10	Program Loyalitas Pelanggan

PSAK & ISAK



27

No	IFRS		PSAK	
1	IAS 1	Presentation of Financial Statements	PSAK 1	Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) → Revisi 2013
2	IAS 2	Inventories	PSAK 14	Persediaan (revisi 2008)
3	IAS 7	Statement of Cash Flows	PSAK 2	Laporan Arus Kas (revisi 2009)
4	IAS 8	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors	PSAK 25	Kebijakan Akuntansi Perubahan estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (revisi 2009)
5	IAS 10	Event after the reporting Period	PSAK 8	Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan(revisi 2010)
6	IAS 11	Construction Contracts	PSAK 36	Kontrak Konstruksi (revisi 2011)
7	IAS 12	Income Taxes	PSAK 46	Pajak Penghasilan - (revisi 2013)
8	IAS 16	Property, Plant and Equipment	PSAK 16	Aset Tetap(revisi 2007)
9	IAS 17	Leases	PSAK 30	Sewa (revisi 2007)
10	IAS 18	Revenue	PSAK 23	Pendapatan (revisi 2010)
11	IAS 19	Employee Benefits	PSAK 24	Imbalan Kerja (revisi 2010) → Revisi 2013
12	IAS 20	Accounting for Governance Grants and Disclosure of Government Assistance	PSAK 61	Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah(revisi 2011)

PSAK & ISAK



28

No	IFRS		PSAK	
13	IAS 21	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	PSAK 10	Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing (revisi 2010)
14	IAS 23	Borrowing Costs	PSAK 26	Biaya Pinjaman (revisi 2009)
15	IAS 24	Related Party Disclosures	PSAK 7	Pengungkapan Pihak Berelasi (revisi 2009)
16	IAS 26	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans	PSAK 18	Akuntansi Dana Pensiun (revisi 2011)
17	IAS 27	Consolidated and Separate Financial Statement	PSAK 4	Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (revisi 2009) → Revisi 2013 Laporan Keuangan Tersendiri
18	IAS 28	Investment in Associates and joint ventures	PSAK 15	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
19	IAS 29	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	PSAK 63	Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi (revisi 2010)
20	IAS 31	Interests in Joint Ventures (digantikan IFRS 11)	PSAK 12	Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama (revisi 2009)
21	IAS 32	Financial Instruments: Presentation	PSAK 50	Instrumen Keuangan Penyajian (revisi 2013)
22	IAS 33	Earnings per Share	PSAK 56	Laba per Saham (revisi 2009)
23	IAS 34	Interim Financial Reporting	PSAK 3	Laporan Keuangan Interim (revisi 2010)
24	IAS 36	Impairment of Assets	PSAK 48	Penurunan Nilai - (revisi 2013)

PSAK & ISAK



29

No	IFRS		PSAK	
25	IAS 37	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	PSAK 57	Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (revisi 2009)
26	IAS 38	Intangible Assets	PSAK 19	Aset Tidak Berwujud (revisi 2010)
27	IAS 39	Financial Instruments: Recognition and Measurement	PSAK 55	Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2013)
28	IAS 40	Investment Property	PSAK 13	Properti Investasi (revisi 2007)
29	IAS 41	Agriculture	PSAK 69	Agrikultur
30	SIC 12	Consolidation – Special Purpose Entities	ISAK 7	Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (revisi 2009)
31	SIC 13	Jointly Controlled Interest – non Monetary Contribution by Ventures	ISAK 11	Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
32	SIC 15	Operating Leases – Incentives	ISAK 19	Sewa Operasi – Insentif
33	SIC 21	Income Taxes – Recovery of Revalued non Depreciable Assets		
34	SIC 27	Evaluating the Substance Transaction in the Legal Form of Lease	ISAK 8	Transaksi Mengandung Sewa
35	SIC 32	Intangible Assets – Website Costs	ISAK 14	Biaya Situs Web
36			ISAK 21	Perjanjian Konstruksi Real Estate

Mapping Hubungan antar IFRS



30

- PSAK memiliki kaitan satu sama lain yang harus dipahami oleh pengguna dan pengajar secara komprehensif.
- PSAK terkait Aset Tetap misalnya bukan hanya PSAK 16 namun juga PSAK 26 Bunga Pinjaman, PSAK 58 Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, PSAK 68, dll
- PSAK terkait investasi : PSAK 50/55/71 untuk instrumen keuangan, PSAK 15 untuk akuntansi ekuitas pada Asosiasi dan JV, juga Hubungan PSAK 65, 66 dan 67.
- PSAK terkait Pendapatan : PSAK 23, 34, 44, ISAK 10
- Hubungan PSAK 68 dengan PSAK-PSAK terkait lainnya

Thank You



31

- Follow my twitter [@ersatriwahyuni](#)
- Blog : [etw-accountant.com](#)